



Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian  
**Republik Indonesia**

# KEBIJAKAN MIKRO & MAKRO EKONOMI GUNA MEMPERKUAT INDUSTRI LOGISTIK NASIONAL

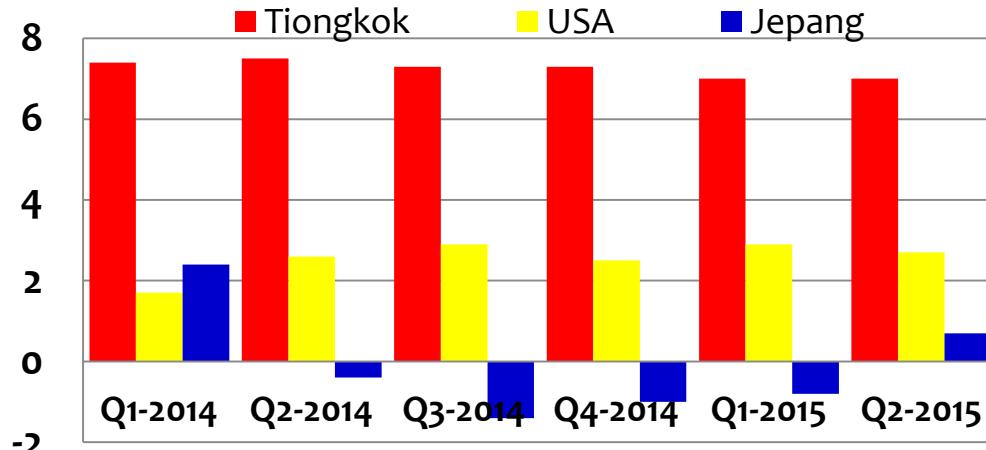
**Edy Putra Irawady**  
Deputi Menko Perekonomian  
Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri

RAPIM PUSAT I ALFI 2015

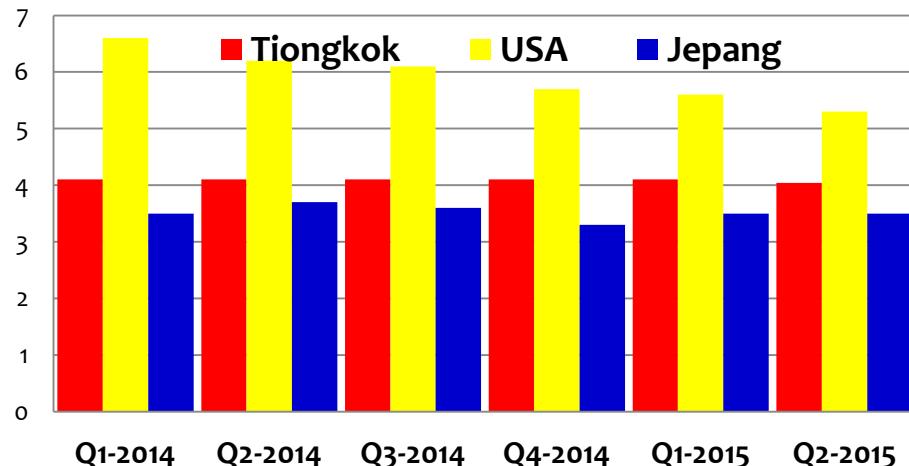
Jakarta, 6 Oktober 2015

# Perkembangan Ekonomi Global

## Pertumbuhan Ekonomi (%)



## Unemployment Rate (%)

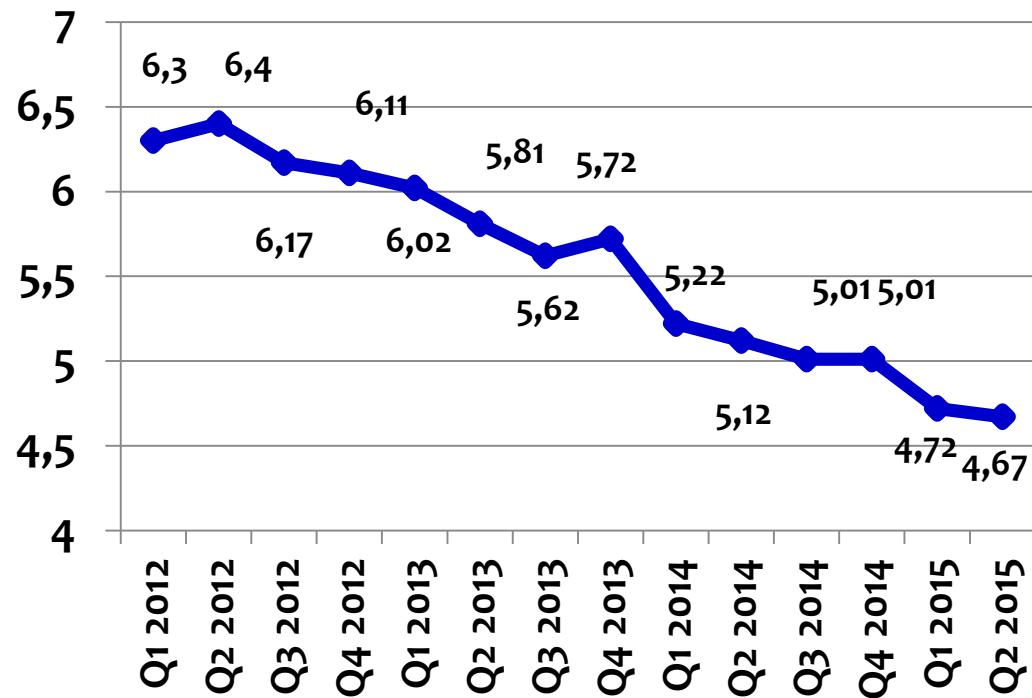


Pertumbuhan ekonomi Triwulan II Tahun 2015, Jepang mengalami peningkatan menjadi 0.7% dari sebelumnya -0.8% sedangkan untuk Tiongkok tetap senilai 7% dan Amerika Turun menjadi 2.7% dari sebelumnya 2.9%.

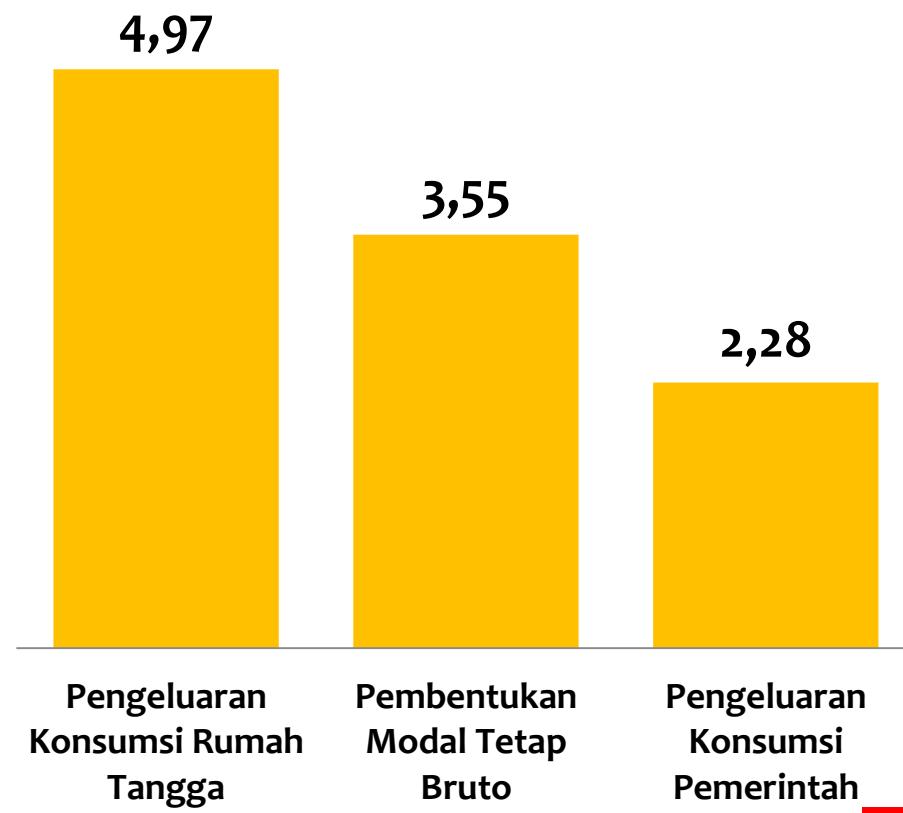
*Unemployment rate* Triwulan II Tahun 2015, Tiongkok dan Amerika masing – masing menurun menjadi 4.04% dan 5.3% dan Jepang tetap senilai 3.5%.

- *Ekonomi Indonesia triwulan II-2015 tumbuh 4.67% YoY, melambat dibanding capaian triwulan II-2014 yang tumbuh 5.03% dan triwulan I-2015 yang tumbuh 4.72%.*
- *Dari sisi pengeluaran Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Sebesar 4.97% (yoY).*

Pertumbuhan Ekonomi (%)

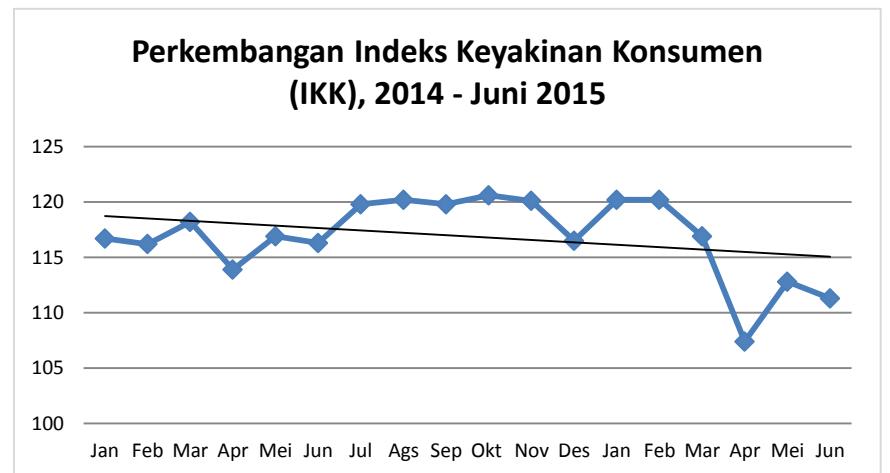
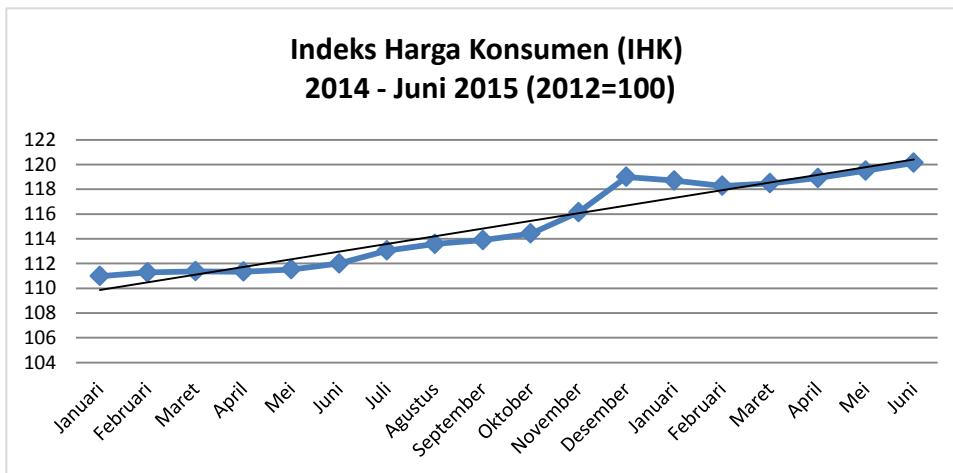


Pertumbuhan Ekonomi (%)  
Menurut Pengeluaran



# PENURUNAN DAYA BELI MASYARAKAT DALAM KONSUMSI SWASTA MENGKONTRIBUSI PERLAMBATAN EKONOMI

Konsumsi masyarakat Q1/2015 tumbuh 4,7% yoy, menurun dibandingkan dengan rata-rata tingkat pertumbuhan 5,3% tahun lalu. Padahal porsi kontribusi konsumsi masyarakat sebesar 55%, sehingga menjadi mesin penggerak perekonomian Indonesia.



- Indeks harga konsumen (IHK) adalah indeks dari harga yang dibayar konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa.
- Pada Juni 2015 IHK adalah 120,14 artinya sejak tahun 2012 sudah ada perubahan sebesar 20,14%.

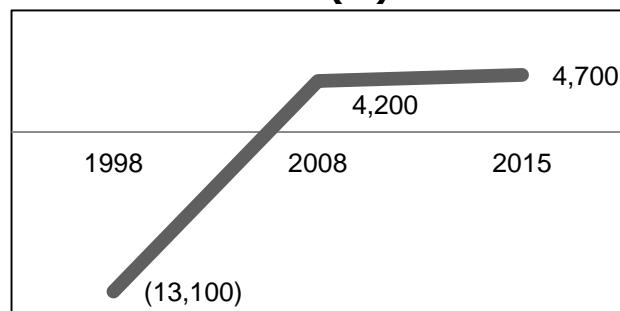
- IKK digunakan untuk mengidentifikasi pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari keyakinan konsumen terutama berupa pengeluaran konsumsi rumah tangga.
- Selama Jan-Jun 2015 IKK turun sebesar 7%.

Sumber: BI dan BPS

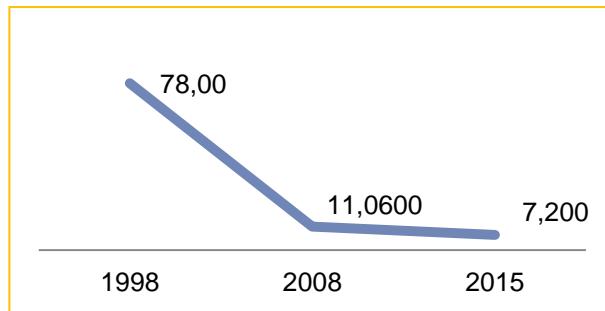
# PERBANDINGAN KONDISI EKONOMI INDONESIA 1998, 2008, dan 2015

Uraian	1998	2008	2015
PDB (%)	(13,1)	4,2	4,7
Nilai Tukar (Rp/USD)	16.000,0	10.500,0	14.300,0
Inflasi (%)	78,0	11,1	7,2
Suku Bunga Simpanan Bank (%)	60 - 70	6 - 9	4 - 8
Rasio Utang Luar Negeri atas PDB (%)	127,0	40,0	33,0
IHSG	250,0	2.000,0	4.500,0
Cadangan Devisa (USD Milyar)	23,0	50,0	107,0

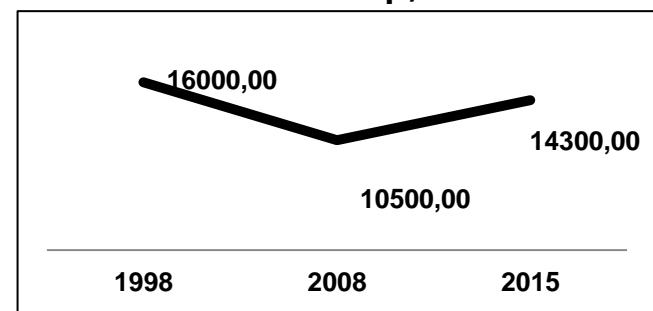
PDB (%)



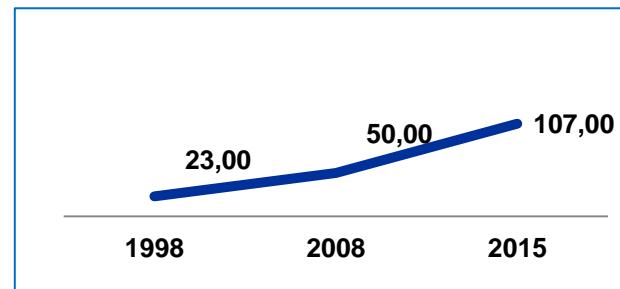
INFLASI (%)



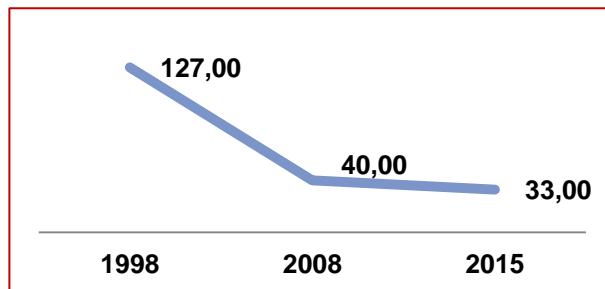
NILAI TUKAR Rp/USD



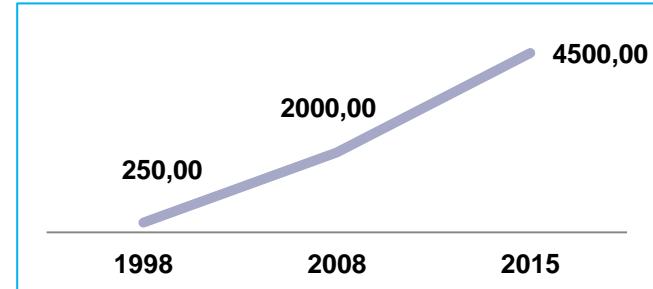
CADANGAN DEVISA (USD MILYAR)



RASIO UTANG LUAR NEGERI ATAS PDB (%)



IHSG



Sumber: Artikel Elba Damhuri "Menakar Kekuatan Ekonomi Indonesia", Harian Republika 14 September 2015

\*) untuk inflasi 2015 memakai data YoY Agustus 2014 ke Agustus 2015. Inflasi Januari - Agustus 2015 baru menyentuh 2%

# INTERVENSI PEMERINTAH

Ditengah melemahnya perekonomian dunia yang berdampak kepada perekonomian nasional, pemerintah telah dan akan terus melakukan upaya menggerakkan ekonomi nasional melalui berbagai paket kebijakan ekonomi:

## I. Mengembangkan Ekonomi Makro yang Kondusif

Pemerintah bersama-sama dengan Otoritas Moneter (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan langkah-langkah dalam upaya menciptakan kondisi ekonomi makro yang kondusif, yaitu:

1. Stabilisasi Fiskal dan Moneter (Termasuk Pengendalian Inflasi)
2. Percepatan Belanja
3. Penguatan Neraca Pembayaran

## II. Menggerakkan Ekonomi Nasional

Pemerintah melakukan serangkaian kebijakan deregulasi, debirokratisasi dan memberikan insentif fiskal dalam rangka menggerakkan perekonomian nasional (sektor riil). Pada tahap I meliputi:

1. **Mendorong Daya Saing Industri Nasional (Deregulasi, Debirokratisasi, Insentif Fiskal)**
2. Mempercepat Proyek Strategis Nasional
3. Meningkatkan Investasi di Sektor Properti

## III. Melindungi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan Menggerakan Ekonomi Pedesaan

Pemerintah melakukan langkah-langkah untuk melindungi masyarakat berpendapatan rendah dan masyarakat pedesaan dari dampak melemahnya ekonomi nasional:

1. Stabilisasi Harga Pangan
2. Percepatan Pencairan Dana Desa\*)
3. Penambahan Rastera 13 dan 14\*)

## Mendorong Daya Saing Industri Nasional (Deregulasi, Debirokratisasi, Insentif Fiskal)

1. **Tujuan:** Kebijakan Deregulasi ini diarahkan untuk mendorong daya saing industri, dengan
  - a. Memulihkan dan meningkatkan kegiatan industri/utilisasi kapasitas industri, dan menghilangkan distorsi industri yang membebani konsumen, dengan melepas tambahan beban regulasi dan birokrasi bagi industri, seperti: mempermudah pengadaan bahan baku hasil pertanian, perikanan, perkebunan, dan pertambangan; menghilangkan kewajiban pendaftaran produk jadi; uji teknik produk jadi; mendorong perluasan kegiatan industri baru melalui pengembangan kawasan industri; kemudahan investasi sektor industri; memperlancar pengadaan impor komponen/kelengkapan untuk keperluan ekspor industri; menghilangkan duplikasi pemeriksaan fisik untuk kelancaran ekspor dan distribusi produk industri, dsb;
  - b. Mempercepat penyelesaian kesenjangan daya saing industri, seperti mempermudah birokrasi pengadaan lahan, memperkuat sistem pembiayaan usaha, memperkuat fungsi ekonomi koperasi, meningkatkan kegiatan wisata, membebani sistem pengupahan, penurunan harga gas, konversi BBM ke BBG untuk nelayan, percepatan izin investasi listrik 35.000 MW, dsb;
  - c. Menciptakan inisiatif baru untuk mendorong keunggulan daya saing industri, seperti: fasilitas perpajakan untuk mendorong sektor angkutan, pengembangan pusat logistik berikat, inland FTA, dsb, sehingga industri nasional mampu bertahan di pasar domestik dan berekspansi ke pasar ekspor.

## Mendorong Daya Saing Industri Nasional (Deregulasi, Debirokratisasi, Insentif Fiskal)

### 2. Bentuk Kebijakan Deregulasi:

#### a. Mengurangi Peraturan (Deregulasi):

- Merasionalisasi peraturan dengan menghilangkan duplikasi/redundansi/irrelevant regulations.
- Melakukan keselarasan antar peraturan.
- Melakukan konsistensi peraturan.

#### b. Mempermudah Pelayanan Birokrasi (Debirokratisasi):

- Simplifikasi perizinan seperti satu identitas pelaku usaha/profile sharing, sedikit persyaratan perizinan, dan sebagainya.
- Adanya SOP dan SLA yang jelas dan tegas dalam mekanisme dan prosedur perizinan serta penyediaan help desk dan pengawasan internal yang berkelanjutan.
- Menganut sistem pelimpahan kewenangan kepada PTSP (tempat, bentuk, waktu, biaya).
- Penerapan Risk Management yang selaras dalam proses perizinan.
- Pelayanan perizinan dan non perizinan melalui sistem elektronik.

#### c. Meningkatkan Penegakan Hukum dan Kepastian Usaha:

- Adanya saluran penyelesaian permasalahan regulasi dan birokrasi (damage control channel).
- Pengawasan, pengamanan dan kenyamanan, serta pemberantasan pemerasan dan pungli.
- Membangun ketentuan sanksi yang tegas dan tuntas dalam setiap peraturan.

### 3. Cakupan Kegiatan Industri yang Direlaksasi:

- a. Perluasan Investasi;
- b. Pengembangan Industri;
- c. Perdagangan dan Logistik;
- d. Pengadaan Bahan Baku, terutama untuk sektor pertanian kelautan dan perikanan, hasil hutan, dan barang tambang.

# Menggerakkan Ekonomi Nasional

## Mendorong Daya Saing Industri Nasional (Deregulasi, Debirokratisasi, Insentif Fiskal)

### Rekapitulasi Deregulasi Berdasarkan K/L

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	JUMLAH REGULASI					TOTAL REGULASI
		PP	Perpres	Inpres	Permen	Lainnya	
1.	Kemenko Perekonomian			2			2
2.	Kementerian Perindustrian	1			14		15
3.	Kementerian Perdagangan				30	2	32
4.	Kementerian Keuangan	4			6		10
5.	Kementerian Pertanian	1	1		5		7
6.	Kementerian ESDM	2	7		1	1	11
7.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang	6	1		3		10
8.	Kementerian Lingkungan dan Kehutanan				2		2
9.	Kementerian Ketenagakerjaan	2				1	3
10.	Kementerian Perhubungan				5		5
11.	Kementerian PU PR	1					1
12.	Kementerian Kesehatan				1		1
13.	Kementerian Pariwisata		2				2
14.	Kementerian KUKM				29		29
15.	BKPM					2	2
16.	BPOM					2	2
<b>Total Regulasi</b>		<b>17</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>96</b>	<b>8</b>	<b>134</b>

Revisi Permenhub No.32 tahun 2015 tentang Pengamanan Kargo & Pos serta Rantai Pasok Kargo dan Pos yang Diangkut dengan Pesawat Udara

Inpres Inland FTA

RPP No.32 tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat

PP tentang PPN Jasa Kepelabuhanan

Revisi Permendag No. 27 Tahun 2012 tentang Angka Pengenal Impor

PP tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkut Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut PPN

Revisi Permendag melalui penyederhanaan syarat perizinan ekspor dan impor barang tertentu

PP tentang pusat logistik berikat khusus untuk BBM, LPG, dan Crude Oil

## Kebijakan Deregulasi di Bidang Jasa Logistik

Perluasan Investasi Sektor Industri dari Negara Non FTA

Keamanan Rantai Pasok Moda Udara

Fasilitas PLB Memudahkan Mendapatkan Supply Bahan Baku Industri

API sebagai Satu-Satunya Identitas Importir

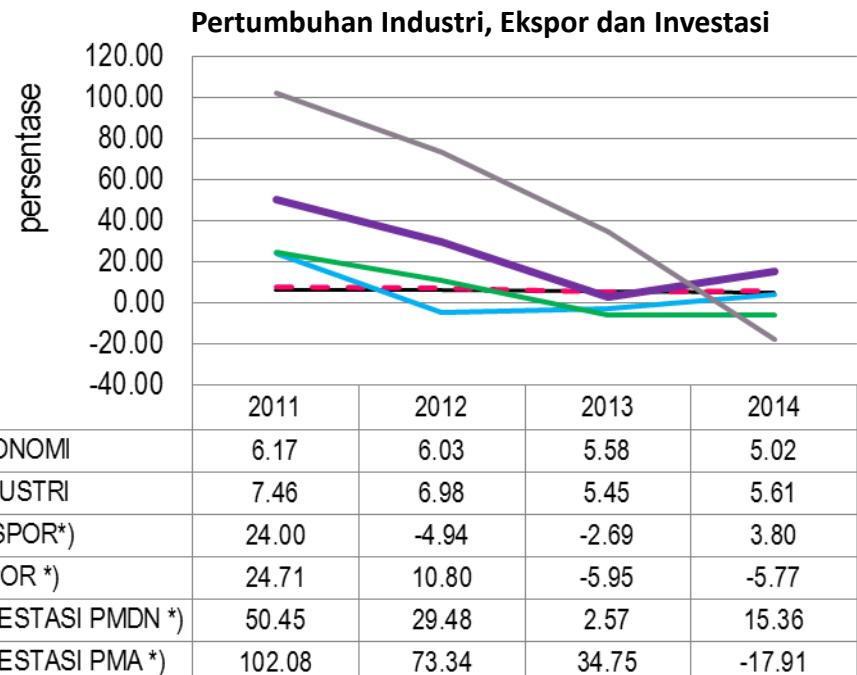
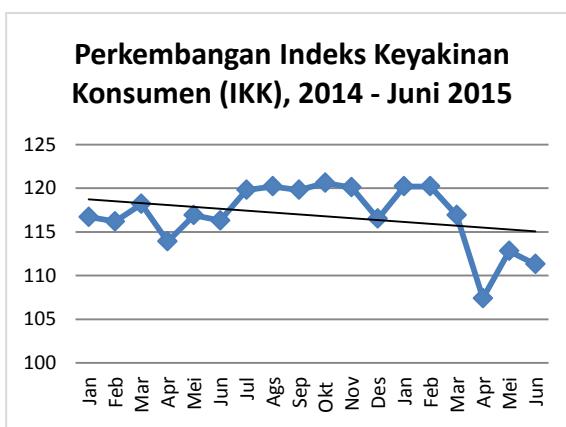
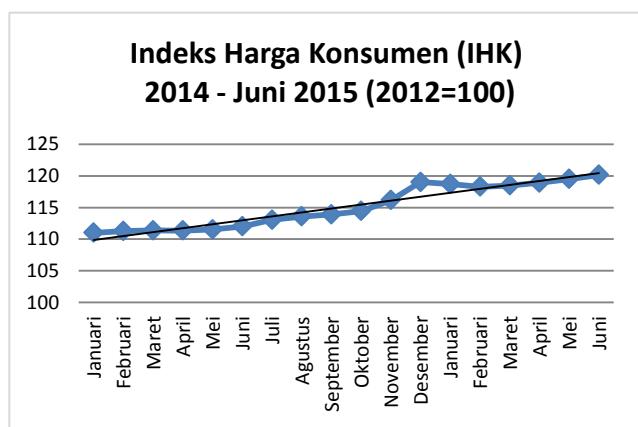
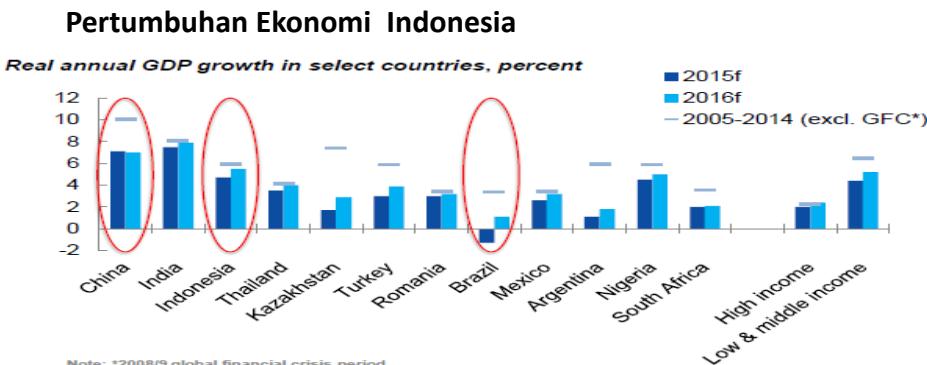
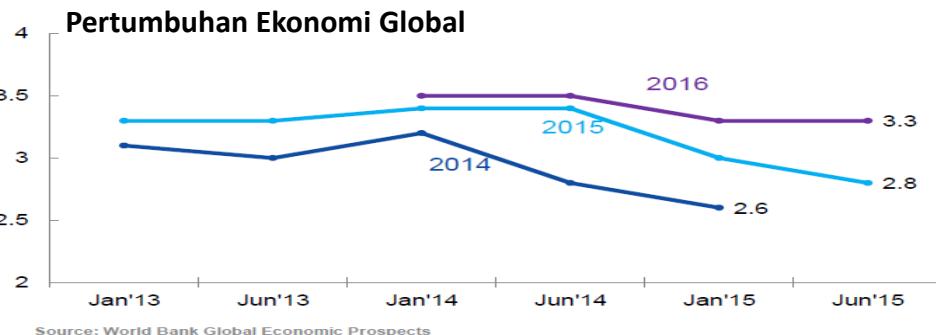
Jaminan Supply Bahan Bakar Migas

Penurunan Biaya Transportasi Umum

Kemudahan Eksport dan Impor Barang

Penurunan Biaya Kepelabuhanan

# PENGUATAN INDUSTRI LOGISTIK NASIONAL



## REKOMENDASI

- Bangun TRUST (Kesetiaan dan Kepercayaan)
- Strategi yang Smart
- Penggunaan Teknologi Informasi;
- Inovasi
- Pengembangan Kapasitas dan kompetensi SDM
- Branding

# UNTUK INDONESIA YANG LEBIH BAIK

*...Bangunlah jiwanya,  
bangunlah badannya  
untuk Indonesia Raya....  
[W.R Supratman]*



**EDY PUTRA IRAWADY**  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI  
PERNIAGAAN DAN INDUSTRI